

# KEBIJAKAN RAJA MENGENAI HARTA WARISAN KELUARGA YANG TERGOLONG *KRĀNGAN* PADA ZAMAN KERAJAAN BALI KUNO YANG HINDUISTIS

Oleh:

I Gde Semadi Astra

Dosen Universitas Udayana Denpasar

## **ABSTRACT:**

*This article discusses one of the facets of life in ancient Balinese times, namely inheritance, especially family estate belonging to *krāngan* (family without children/ descendants), or more precisely the king's policy regarding the inheritance of a childless family. There are three matters concerning the king's policy on the subject which the writer would like to answer based on the data already found, namely (a) of the principal ratios of inheritance of the family internally, (b) about the parties who have a share of the property, and (c) of the philosophical view underlying the distribution. First, the principal ratio of the division of inheritance used by the king is 1: 2 in the sense that one-thirds of the husband's inheritance is the wife's right and two-thirds is the right of the husband. Secondly, the inheritance part of *krāngan* ampung belonging to the movable property is placed on the sacred building of Hyang Api and belonging to immovable property that is placed on the holy building of Hyang Tanda. Thirdly, the philosophical foundation underlying the king's policy is that the property possessed by humans in general is as a "borrowing item" that should not be taken to another world.*

**Keywords:** inscription data, *krāngan*, principal ratio, philosophical foundation

## **I. PENDAHULUAN**

Awal timbulnya keinginan penulis untuk menyusun artikel ini adalah ketika penulis membaca sejumlah prasasti yang berasal dari periode menjelang akhir abad IX sampai dengan lebih kurang pertengahan abad XI (selanjutnya secara lebih singkat disebut periode abad IX-XI saja). Prasasti-prasasti itu semuanya termuat dalam karya R. Goris yang berjudul *Prasasti Bali I* (Goris, 1954a: 53-107). Ada sejumlah prasasti di antaranya memuat aneka data yang berkenaan dengan harta hak milik suatu keluarga. Sudah tentu ketika sebagian atau seluruh anggota keluarga yang bersangkutan meninggal maka hartanya berubah status menjadi warisan.

Agar masalahnya menjadi jelas atau tidak menjadi sumber perselisihan di antara orang-orang yang masih hidup, maka raja atau ratu yang sedang memerintah (selanjutnya keduanya disebut dengan istilah raja atau pucuk pemerintahan)

mengatur segala sesuatunya, misalnya mengenai rasio pembagiannya, jenis harta warisan yang ditinggalkan oleh suatu keluarga serta arah pendistribusiannya. Hal yang cukup menarik perhatian penulis yaitu ada sejumlah bangunan suci keagamaan yang disebut-sebut sebagai pihak penerima sebagian harta warisan tersebut.

Ketika membaca aneka istilah yang berkaitan dengan harta warisan itu, serta merta timbul pula pemikiran pada diri penulis bahwa apabila hal-hal yang tampak sekilas itu diamati secara lebih cermat dan dicoba disusun secara lebih sistematis, tampaknya akan berpeluang untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas dan relatif lebih rinci mengenai harta warisan. Pembicaraan mengenai hal itu penulis berikan judul seperti judul artikel ini.

Agar terdapat kesesuaian antara hal-hal yang ingin penulis kemukakan dan persepsi para pembaca artikel ini, kiranya perlu

diberikan penjelasan ringkas mengenai judul yang diredaksikan seperti itu. Penulis gunakan kata “kebijakan raja” sebagai awal atau subjek dalam kalimat judul tersebut, karena hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam prasasti pada hakikatnya merupakan tindakan-tindakan arif yang dilakukan oleh raja dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di wilayah kerajaannya.

Sementara itu, istilah raja yang digunakan di sini mencakupi pula pengertian ratu sebagaimana telah dijelaskan di depan. Kata raja dalam artikel ini akan digunakan secara silih berganti dengan istilah pucuk pemerintahan. Selanjutnya yang dimaksud dengan keluarga yang tergolong *krāṅgan* adalah pasangan suami-istri yang menikah sudah cukup lama dan sudah tidak mungkin mendapat anak atau keturunan dari pernikahannya serta mereka tidak mengangkat anak sehingga mereka tetap hidup berdua saja. (Bdk dng Goris, 1954b : 215).

Adapun yang dimaksud dengan Zaman Kerajaan Bali Kuno adalah babakan waktu selama berkembangnya kerajaan yang lazim disebut kerajaan Bali Kuno, yaitu sejak abad VIII sampai dengan pertengahan abad XIV (Goris, 1948 : 3-12; Astra, 1997 : 42-43). Kenyataannya, memang kerajaan tersebut bercorak Hinduistik, dengan pengertian yang dimaksud dengan istilah Hinduistik di sini adalah bersifat budaya yang berasal dari tanah Hindu atau India, sehingga di dalam pengertian Hinduistik itu tidak semata-mata budaya agama Hindu tetapi juga termasuk di dalamnya budaya agama Budha. Perlu ditegaskan kembali bahwa pembicaraan dalam artikel ini tidak mencakup keseluruhan Zaman Kerajaan Bali Kuno, tetapi hanya sebagian saja dari zaman tersebut yaitu abad IX-XI.

Berdasarkan penjelasan ringkas mengenai satuan-satuan konsep yang ada dalam judul artikel ini maka dapat dikatakan bahwa pembicaraan dalam artikel ini adalah berkenaan dengan tindakan arif bijaksana yang dilakukan oleh pucuk pemerintahan Kerajaan Bali Kuno yang bercorak Hindu-Buddha mengenai harta warisan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan perkembangan keluarga yang bersangkutan

sehingga pada akhirnya akan terjadi bahwa keluarga itu campur/ceput. Data yang digunakan sebagai dasar pembicaraan adalah data prasasti yang berasal dari kurun waktu abad IX-XI.

Ada tiga masalah tentang hal itu yang dirumuskan dan dicoba dijawab berdasarkan data prasasti yang ditemukan. Ketiga masalah itu adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kebijakan raja mengenai rasio prinsipal yang diterapkan dalam pembagian harta warisan keluarga yang tergolong *krāṅgan* ?
2. Bagaimanakah kebijakan raja mengenai pihak-pihak yang mendapat distribusi harta warisan tersebut serta jenis harta warisan yang didapat oleh masing-masing pihak ?
3. Bagaimana pula pandangan filosofis yang melandasi kebijakan raja berkenaan dengan pendistribusian harta warisan tersebut ?

Perlu diketahui bahwa di antara 41 buah prasasti yang berasal dari periode abad IX-XI hanya 16 buah prasasti yang memuat data tentang kebijakan raja mengenai pengaturan harta warisan, yaitu prasasti-prasasti nomor 001, 002, 003, 005, 006, 007, 101, 104, 107, 108, 110, 302, 303, 305, 352, dan 353 (Goris, 1954a: 53-103). Data yang terdapat dalam prasasti-prasasti itu tidak sama, melainkan sangat bervariasi atau berbeda. Artikel ini bukan bertujuan untuk membahas keseluruhan data yang bervariasi itu tetapi perhatian lebih diarahkan kepada data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data yang lain akan dibicarakan sesuai dengan keperluan.

Data dikumpulkan secara kompilatif dari prasasti-prasasti yang telah disebutkan. Tidak ada teori khusus digunakan untuk mempertajam analisis data. Namun, sesuai dengan konteks pembicaraan, dalam upaya lebih memahami maksud data digunakan sejumlah pendekatan seperti pendekatan sosiologis, antropologis, historis, dan politikologis. Penulis sangat menyadari tulisan yang disajikan ini sangat jauh di bawah harapan pembaca. Kendati demikian, penulis tetap mengharapkan ada manfaatnya barang sedikit atau secuil.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Status Keluarga

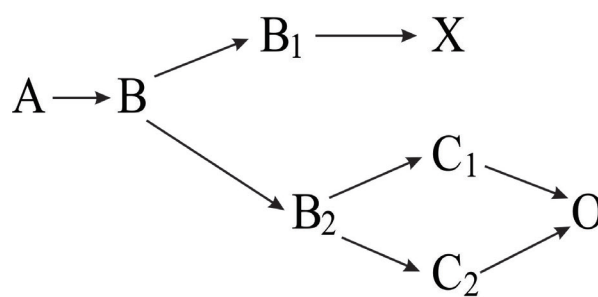
Sebelum menyajikan kutipan-kutipan bagian teks prasasti atau pembeberan data prasasti yang akan digunakan sebagai bahan kajian utama, pada kesempatan ini penulis memandang perlu dikemukakan lebih dahulu sejumlah istilah yang berkenaan dengan status keluarga atau status perkawinan seseorang sebagaimana disebutkan dalam prasasti. Istilah-istilah itu memang digunakan dalam kaitan dengan status keluarga *bhikṣu* yang berdiam di suatu kompleks pertapaan atau semacamnya yang berada di wilayah suatu desa. Kendati demikian, hampir seluruh istilah yang akan dikemukakan, rupanya berlaku pula bagi status keluarga penduduk biasa di wilayah desa yang bersangkutan.

Dalam aturan yang ditetapkan oleh raja mengenai para *bhikṣu* yang berdomisili di kompleks pertapaan di Katahan Buru yang berada di daerah perkebunan di Bukit Cintamani, sebagaimana tercantum dalam prasasti 001 Sukawana AI (804 Saka) (Goris, 1954a : 53) disebutkan bahwa apabila *bhikṣu śuddha ganitri* (*bhikṣu* yang belum menikah) meninggal maka pungutan berkenaan dengan kematiannya adalah sebesar 2 *māsaka* mas. Sementara itu, apabila yang meninggal adalah *bhikṣu grāma* (*bhikṣu* yang sudah menikah / bersuami-istri), baik pasangan suami-istri itu punya anak (*sadāyādyā*) maupun tanpa anak atau keturunan (*krāṅgan*) pungutan berkenaan dengan kematiannya adalah sebesar 4 *māsaka* mas.

Dalam bagian teks berikutnya dari prasasti yang telah disebutkan, raja menetapkan aturan mengenai sistem pembagian harta warisan *bhikṣu* yang telah meninggal. Mengenai sistem pembagian itu tidak dibicarakan di sini. Hal itu akan dibahas secara lebih detail dalam bagian lain dari artikel ini. Hal yang ingin penulis kemukakan di sini adalah bahwa pada bagian tentang pengaturan harta warisan itu disebutkan pula sejumlah istilah yang berkenaan dengan status keluarga. Istilah-istilah itu adalah *krāṅgan mabalu* (keluarga tanpa anak yang ada janda atau dudanya), (*krāṅgan mabalu maruhani* yaitu keluarga tanpa anak yang

tinggal dudanya saja, *krāṅgan mabalu babini* yaitu keluarga tanpa keturunan yang tinggal jandanya saja, dan *krāṅgan ampung* yaitu keluarga tanpa anak yang semuanya sudah meninggal sehingga keluarga tersebut berada dalam keadaan *camput* / *ceput* atau *putung* (bahasa Bali Baru) atau putus keturunan (tidak memiliki keturunan). Maksud istilah *krāṅgan ampung* tampaknya identik dengan maksud atau arti *krāṅgan tumpur* yang terbaca dalam prasasti nomor 303 Bwahan A (916 Saka) (Goris, 1954a : 84).

Apabila masing-masing istilah status keluarga tersebut di atas diposisikan pada sebuah diagram alur maka akan didapat gambaran sebagai berikut.



Keterangan :

- A : *Bhikṣu śuddha ganitri* (*bhikṣu* yang belum menikah)
- B : *Bhikṣu grāma*, (*bhikṣu* yang sudah menikah atau bersuami-istri).
- B1 : Keluarga *bhikṣu sadāyādyā*, (suami-istri yang mempunyai anak atau keturunan).
- B2 : Keluarga *bhikṣu krāṅgan* (suami-istri yang tidak memiliki anak/keturunan).
- X : Keluarga *bhikṣu* atau suami-istri yang mempunyai keturunan sehingga keluarga tersebut dapat terus berkembang.
- C1 : *Krāṅgan mabalu maruhani* (duda yang hidup sendiri tanpa anak/keturunan).
- C2 : *Krāṅgan mabalu babini* (janda yang hidup sendiri tanpa anak/keturunan).
- O : *Krāṅgan ampung* atau *krāṅgan tumpur* (keluarga tanpa keturunan dan semua anggota keluarganya sudah meninggal ; keluarga yang tidak memiliki keturunan), *camput* / *ceput* / *putung* (bahasa Bali Baru).

Telah dikatakan bahwa istilah-istilah itu, dalam prasasti 001 Sukawana A.I (804 Saka), memang digunakan untuk menyatakan status keluarga *bhikṣu*, namun rupanya hampir semua istilah itu juga digunakan untuk menyatakan status keluarga non-*bhikṣu*, kecuali istilah *śuddha ganitri* dan *grāma*. Sepanjang yang telah diketahui, kedua istilah itu digunakan hanya untuk kalangan *bhikṣu* (termasuk *bhikṣuni*), tidak pernah digunakan untuk penduduk yang non-*bhikṣu*.

Istilah *śuddha ganitri* digunakan untuk menyatakan *bhikṣu* (termasuk *bhikṣuni*) yang belum menikah. Penulis belum menemukan istilah khusus untuk menyatakan penduduk desa non-*bhikṣu* yang belum menikah. Kompositum *karmadhāraya* (Skt) atau kata majemuk atributif *śuddha ganitri* (Skt) dibentuk atas kata *śuddha* yang berarti ‘suci, bersih’ dan *ganitri* yang berarti ‘untaian tasbih’ (Monier-Williams, 1986 : 1082; Macdonell, 1974 : 316; Zoetmulder, 1982a : 488; 1982b : 1830). Dengan demikian, *śuddha ganitri* secara harfiah berarti ‘untaian tasbih suci’. Ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa sebagai sebuah istilah kata majemuk itu diberikan muatan arti atau makna yang bersifat konotatif, yaitu untuk menyatakan seorang *bhikṣu* yang tubuhnya dipandang masih suci, dalam artian belum pernah berhubungan intim dengan seseorang atau *bhikṣu* yang berlawanan jenis kelamin. Istilah *śuddha ganitri* ini serta merta mengingatkan penulis kepada istilah *śukla brahmacāri* yang terbaca dalam pustaka lontar Panca Siksa. Disana dikatakan bahwa *suklabrahmacari* adalah orang laki-laki maupun perempuan yang langsung menjadi pendeta (*wiku*) tanpa pernah melakukan hubungan badan (seks) dengan lawan jenis kelaminnya, atau tidak pernah melakukan pernikahan/perkawinan. Dia tekun mempelajari sastra keagamaan dan masalah kependetaan. Bahkan, saking tekunnya dia ibarat telah menikah dengan hal-hal tersebut (*kewala sang hyang dharma kinurēn mwan sanghyang kabujanggan*) (Astra, 2013 : 118-119). Perlu ditegaskan bahwa dengan menggunakan kata “mengingatkan” itu, sama sekali penulis tidak ingin mengidentikkan,

apalagi menyamakan kedua istilah itu, baik arti maupun konteks pemakaiannya.

Keterangan tambahan lain yang dapat dikemukakan di sini adalah berkenaan dengan istilah *grāma*. Seperti telah dikatakan istilah *grāma* juga digunakan hanya untuk menyatakan *bhikṣu* (baik laki-laki maupun perempuan) yang sudah menikah. Untuk menyatakan penduduk biasa atau non-*bhikṣu* yang sudah menikah digunakan istilah *rggap* (*rgēp*) untuk laki-laki, dan untuk penduduk perempuan digunakan istilah *babini* (Goris, 1954b : 297). Istilah *babini*, seperti telah disebutkan di depan, juga digunakan untuk menyatakan *bhikṣu* (baca *bhikṣuni*) yang sudah berstatus sebagai janda. Mudah dipahami bahwa seorang janda, baik *bhikṣu* maupun non *bhikṣu*, adalah perempuan yang sudah menikah atau lebih tepatnya sudah pernah menikah.

Kata *grāma* (Skt) secara harfiah berarti ‘desa’ (Monier-Williams, 1986 : 373; Macdonell, 1974 : 88; Zoetmulder, 1982a : 542). Sementara itu, istilah *raggap* (*rgēp*) dan *babini* yang digunakan di kalangan penduduk non *bhikṣu*, serta istilah *grāma* yang digunakan untuk kalangan *bhikṣu* pada intinya adalah untuk menyatakan orang-orang yang sudah ‘lengkap’, dalam artian sudah bersuami istri. Adalah logis golongan penduduk yang sudah berstatus keluarga seperti itu dikaitkan dengan eksistensi desa sebagai satuan wilayah administratif. Dikatakan demikian, karena kelompok penduduk tersebut dipandang benar-benar telah dewasa, baik fisik maupun psikis, serta mampu diajak berpikir mengenai aneka urusan desa. Dengan kata lain, merekalah yang resmi menjadi anggota *krama desa* yang bersangkutan dan wajib hadir dalam rapat-rapat desa yang bersangkutan. Hal seperti itulah yang tampaknya berlaku sampai pada dewasa ini dan berlaku di seluruh desa di Bali. Pada zaman Bali Kuno golongan penduduk desa seperti itu disebut *kāramān* sedangkan pada dewasa ini lazim disebut *krama* atau secara lebih lengkap misalnya *karaman i baturan sapaasuk thāni* (*krama* desa Baturan atau *krama* Baturan sewilayah desanya), (Goris, 1954a : 96).



## 2.2 Rasio Prinsipal Pembagian Harta Warisan Keluarga *Krāṅgan*

Pembicaraan mengenai hal itu boleh dikatakan pembicaraan yang berdimensi internal, dalam artian pembicaraan yang hanya mengenai suami-istri yang tidak memiliki anak atau keturunan, baik keluarga itu tergolong keluarga *bhikṣu* maupun non-*bhikṣu*. Untuk mendasari pembicaraan, sekaligus sebagai data yang digunakan sebagai dasar argumentasi, di bawah ini disajikan kutipan bagian teks prasasti nomor 001 Sukawana AI (804 Saka) yang berbunyi sebagai berikut.

Ila. 4 ‘... ana uparata ta anak marumah ditu ...

5. ...

Ilb. 1 ‘... krangan mabalu ya, suhunan tanggungan ulihangen humatur drbyan prakara, maruhani dua bhagi haturangna babini habhagi haturangna ...’ (Goris, 1954a : 53)

Terjemahannya :

Ila. 4 ‘... apabila ada meninggal (di antara) orang-orang yang berdiam di sana....

5. ...

Ilb. 1 (jika) tergolong keluarga tanpa anak yang ada janda atau dudanya, maka atas dasar rasio principal 1: 2 hendaknya mereka menghaturkan segala harta warisannya, (jika) yang laki-laki (meninggal) dua bagian yang dihaturkan, (jika) yang perempuan (si istri) meninggal satu bagian supaya dihaturkan ...’.

Rasio 1 : 2 didapat dari terjemahan kata-kata *suhunan tanggungan* dengan dasar pengertian sebagai berikut. *Suhunan* berarti ‘junjungan’ mengingatkan orang kepada cara seorang perempuan membawa beban yang relatif cukup banyak yaitu dengan menjunjung di atas kepalanya dan *tanggungan* mengingatkan orang kepada cara seorang laki-laki membawa beban yaitu dipikul pada bahu atau pundaknya dengan bantuan kayu atau bambu sebagai alat pemikulnya (*sanan*, bahasa Bali) sehingga beban atau barang yang dapat diangkut sekaligus dua keranjang atau semacamnya, yaitu di depan satu keranjang dan di belakang satu keranjang lagi. *Suhunan* merepresentasikan bilangan rasio 1 (satu) dan *tanggungan* merepresentasikan bilangan rasio 2 (dua). Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan rasio

prinsipal pembagian harta warisan suami-istri tanpa anak, maka rasio tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila keseluruhan harta warisan mereka dibagi tiga maka sepertiganya adalah hak si istri dan dua pertiganya adalah milik si suami.

Maksud istilah *suhunan tanggungan* (bahasa Bali Kuno) sama dengan maksud istilah *asuun atēgēn* (bahasa Bali baru) dan *rēmbat asuun* (Lor, 1980). Dalam prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuno yang muncul belakangan di Bali, untuk maksud yang sama dengan istilah-istilah di atas ini, digunakan pula istilah *patlun* dan di Jawa digunakan istilah *tribhagan* (Astra, 1997 : 121; 450; 472 : Sumandio (ed), 1990 : 333). *Tribhagan* secara harfiah berarti “tiga bagian” (Lanman, 1959 : 205). Maksudnya adalah identik dengan maksud istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, yaitu keseluruhan harta warisan keluarga tanpa keturunan dibagi menjadi tiga bagian.

Sekarang timbul pertanyaan, “ke mana masing-masing bagian itu dihaturkan apabila “pemiliknya” telah meninggal?”. Dari bagian teks prasasti 001 Sukawana AI (804 Saka) lebih lanjut diketahui bahwa ada tiga pihak atau tiga bangunan sakral yang mendapat distribusi harta warisan dengan spesifikasi tertentu, yaitu bangunan suci Hyang Api, Hyang Tanda, dan satra (pesanggrahan) yang berada dalam kompleks pertapaan di Katahan Buru. Pembicaraan lebih rinci mengenai jenis harta warisan yang diterima oleh masing-masing pihak tersebut dan sejumlah keterangan lainnya ditunda dulu, dan akan dibicarakan dalam bagian berikutnya dalam artikel ini.

Hal yang penulis pandang perlu dikemukakan di sini adalah perkecualian atau anomali yang berkenaan dengan pelaksanaan rasio prinsipal pembagian harta warisan tersebut sebagaimana terbaca dalam prasasti nomor 636 Jagaraga (-Saka). Rasio prinsipal pembagian harta warisan keluarga tanpa keturunan yang disebutkan dalam prasasti itu masih tetap 1 : 2, akan tetapi dikatakan bahwa jika si suami (*lanang*) meninggal lebih dahulu maka dua pertiga dari keseluruhan harta warisan mereka diserahkan kepada si istri (*walu*) yang telah menjadi sebatang kara dan yang

sepertiganya lagi dihaturkan kepada Hyang Api (Apwi) (*mangkana yan hana krāṅgan pjaḥ di thāninya, patlun sakwaiḥ ni kdik dṛwyanya, yan lanang pjaḥ rwang bhāga mareng walu, sabhaga mareng hyangapwi*) (Astra, 1980 : 9).

Aturan penyerahan bagian-bagian harta warisan apabila terjadi keadaan sebaliknya yaitu si istri meninggal lebih dahulu memang tidak tercantum dalam prasasti itu. Akan tetapi, seandainya tidak terjadi hal yang istimewa lagi, maka kemungkinan besar aturan yang diberlakukan adalah sepertiganya diserahkan kepada si suami yang sudah hidup sebatang kara dan dua pertiganya dihaturkan kepada Hyang Api.

Kenyataan bahwa pihak suami (laki-laki) mendapat hanya sepertiga dari keseluruhan harta keluarga tanpa anak/keturunan (*krāṅgan*) yang bersangkutan dan pihak istri (perempuan) mendapat dua pertiganya itulah yang penulis pandang sebagai sebuah anomali. Sepanjang penulis telah ketahui tidak ada prasasti lain yang memuat aturan seperti itu. Dengan penegasan ini penulis ingin mengakhiri pembicaraan dalam upaya menjawab masalah pertama dalam artikel ini.

### 2.3 Pihak-pihak yang Mendapat Distribusi Harta Warisan serta Jenisnya yang Didapat

Pada bagian ini akan dibicarakan jawaban masalah kedua yaitu pembagian atau pendistribusian harta warisan *krāṅgan ampung* (bahasa Bali Kuno) atau keluarga yang dalam keadaan *camput* atau *ceput* (bahasa Bali Baru) yaitu keluarga yang semua anggota keluarganya telah meninggal dan tidak ada keturunannya yang melanjutkan perkembangan keluarga tersebut. Cukup menarik perhatian, seperti akan diketahui dari pembicaraan lebih lanjut, dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkannya, raja atau pucuk pemerintahan menetapkan bahwa harta warisan itu didistribusikan ke sejumlah bangunan suci keagamaan atau yang erat berkaitan dengan agama. Lebih menarik perhatian lagi, distribusi itu tidak dilakukan secara acak, melainkan diatur secara jelas dan rinci, dalam artian bahwa bagian harta

warisan dengan spesifikasi tertentu dihaturkan kepada bangunan suci tertentu pula.

Bagian teks prasasti yang digunakan sebagai dasar kajian atau bahasan pada kesempatan ini adalah bagian teks prasasti nomor 001 Sukawana AI (804 Saka) yang telah disebutkan. Bagian teks prasasti itu akan segera disajikan di bawah ini yang merupakan lanjutan dari bagian teks yang telah disajikan di depan. Bagian teks itu berbunyi sebagai berikut.

- II.b. 1. "... ana krāṅgan
2. ampung ya, marang hadan padangayañña ya baña marumahḥ ditu, mas pirak, kangsabhajana, tambrabhajana, hulun rbwang, karambo, sampi, mulyan mā
  3. saka 4 alapan marhantuangña sesan yalapña marhantuangña, panekñ di hyang api kajadyan atithi an hana huma, parlak, padang, ngma
  4. I kajadyan tmuan hyang tanda, tathāpi tua bilang, panekñ ditu di satra pyuṅyanangku kajadyan pamli pulu, tikēr pangjakanyan anak pati
  5. kērṇ anak atar jalan almangñ,..... (Goris, 1954a : 53-54).

Terjemahan agak bebas :

- II.b. 1. "... apabila ada *krāṅgan*
2. *ampung* (keluarga *camput* / keluarga yang tidak memiliki keturunan), maka segala hartanya termasuk alat-alat memasak yang dibawanya berumah di sana, mas, perak, bejana perunggu, bejana tembaga, hamba sahaya, kawan, kerbau, dan sapi, [dari harta itu] supaya sebanyak-banyaknya
  3. diambil 4 *māsaka* untuk biaya kematiannya, sisa dari yang diambil untuk biaya kematiannya supaya dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Api untuk dijadikan *atithi*. Apabila ada [harta yang berupa] sawah, ladang, bidang tanah yang ditumbuhi rumput saja, dan kebun
  4. supaya dihaturkan kepada Hyang Tanda untuk dijadikan *tmuan*. Demikianlah harta warisan yang berupa *bilang* supaya dihaturkan kepada pesanggrahan (*satra*)

yang aku telah berikan, untuk dijadikan pembeli tempat beras (sudah tentu juga dengan berasnya) dan tikar, [berasnya] untuk ditanak, [tikarnya] untuk orang-orang

5. yang memerlukan tikar, yaitu rombongan-rombongan kecil yang berjalan naik turun punggung bukit, apabila mereka kemalaman ...’.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang distribusi harta warisan *krāṅgan ampung* yang bersangkutan, ada tiga catatan yang penulis ingin bicarakan lebih dahulu, yaitu tentang kata *atithi*, *tmuan*, dan *anak atar*. Pertama, tentang *atithi*. *Atithi* (Skt) secara harfiah berarti ‘tamu’. (MacDonell, 1974 : 6). Sudah tentu tidak masuk akal bahwa kelompok atau jenis harta warisan tertentu dipandang sebagai tamu di sebuah bangunan suci keagamaan, dalam hal ini Hyang Api. Apabila dilihat jenis-jenis harta warisan yang disebutkan sebelumnya, maka kemungkinan besar yang dimaksud dengan *atithi* di sini bukan tamu itu sendiri, tetapi untuk memenuhi keperluan ketika menjamu tamu yang hadir di bangunan suci Hyang Api, misalnya ketika terjadi persembahyangan di bangunan suci tersebut. Hal-hal yang diperlukan itu dapat berupa makanan untuk disuguhkan kepada tamu serta tenaga untuk melayani tamu yang kiranya cukup banyak. Jenis harta warisan yang dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Api ternyata cocok untuk mengisi keperluan dalam upaya menjamu para tamu seperti telah disebutkan.

Kedua, tentang kata *tmuan*. Kata *tmuan* mengingatkan penulis kepada kata *temon-temon* (bahasa Bali Baru) yaitu suatu harta warisan yang lazimnya diharapkan oleh tokoh yang mewariskan agar benda tersebut tidak dijual, kecuali sangat terpaksa. Tujuannya adalah agar harta warisan itu masih tetap dapat dilihat atau ditemukan dari generasi ke generasi berikutnya.

Ketiga tentang *anak atar* atau lebih lengkapnya *anak atar katba kadahulu* (Goris, 1954a : 53) yang artinya ‘rombongan-rombongan kecil yang berjalan naik turun’. Kelompok kata itu menggambarkan bahwa orang-orang di sekitar

Katahan Buru pada zaman dahulu sering kali naik turun atau hilir mudik di punggung bukit di daerah Kintamani untuk keperluan pulang pergi ke ladang yang terletak di lereng gunung atau bukit di wilayah itu. Mudah dipahami bahwa cuaca di daerah itu tidak selalu baik, bahkan sering kali turun hujan. Apabila turun hujan atau ada hambatan lain yang cukup lama, bukan mustahil menyebabkan rombongan-rombongan kecil itu kemalaman dalam perjalanan sehingga mereka harus menginap di *satra* yang berada dalam kompleks pertapaan di Katahan Buru.

Setelah mendahulukan tiga catatan tersebut, sekarang dicoba mencermati isi atau maksud kutipan bagian teks prasasti di atas. Segera dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang ditetapkan oleh raja untuk mendapat distribusi bagian harta warisan *krāṅgan ampung*, yaitu bangunan suci Hyang Api, Hyang Tanda, dan pesanggrahan (*satra*) yang berada di kompleks pertapaan di Katahan Buru. Lebih lanjut, apabila dilihat secara lebih seksama maka dapat diketahui bahwa jenis harta warisan *krāṅgan ampung* yang dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Api, baik yang berupa benda mati seperti mas, perak, bejana perunggu, bejana tembaga, dan alat-alat memasaknya maupun yang berupa benda hidup seperti sapi, kerbau, hamba sahaja dan kawan, semuanya termasuk kelompok harta yang menurut istilah hukum pada dewasa ini – harta bergerak. Sebaliknya, yang dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Tanda, seperti sawah, ladang, kebun, dan bidang tanah yang hanya ditumbuhi rumput, semuanya tergolong harta tak bergerak.

Sementara itu, yang diberikan kepada pesanggrahan (*satra*) adalah *bilang* yang secara harfiah berarti ‘hitung’. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan *bilang*? Kemungkinan besar yang dimaksud dengan *bilang* adalah uang, karena memang lazim orang menghitung uang. Selain itu, yang meyakinkan penulis bahwa *bilang* itu adalah uang ialah penggunaannya. Dikatakan bahwa *bilang* yang diberikan kepada pesanggrahan adalah untuk membeli tempat beras, sudah tentu juga berasnya, dan untuk membeli tikar. Beras

itu untuk ditanak dan tikarnya untuk alas tidur bagi rombongan-rombongan kecil yang telah disebutkan yang kemalaman dalam perjalanannya dan perlu menginap di pesanggrahan.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka secara lebih ringkas dapat dikatakan bahwa kebijakan raja atau pucuk pemerintahan berkenaan dengan pendistribusian atau penyaluran harta warisan *krāṅgan ampung* (keluar *campu*) adalah sebagai berikut.

Pertama, pihak-pihak yang mendapat distribusi harta warisan *krāṅgan ampung* ada tiga, yaitu bangunan suci Hyang Api, Hyang Tanda, dan pesanggrahan (*satra*) di kompleks pertapaan di Katahan Buru.

Kedua, bagian harta warisan *krāṅgan ampung* yang tergolong harta bergerak, kecuali *bilang* (uang) dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Api di wilayah tersebut untuk digunakan pada waktu menjamu para tamu yang datang untuk suatu keperluan ke bangunan suci Hyang Api.

Ketiga, bagian harta warisan *krāṅgan ampung* yang tergolong harta tak bergerak dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Tanda dan diupayakan supaya bagian harta warisan itu terpelihara dari generasi ke generasi.

Keempat bagian harta warisan *krāṅgan ampung* yang tergolong harta bergerak yang berupa uang (*bilang*) diberikan kepada pesanggrahan yang berada dalam kompleks pertapaan di Katahan Buru. Uang itu digunakan untuk membeli tempat beras serta beranya dan tikar. Beras untuk ditanak dan tikar untuk alas tidur bagi rombongan-rombongan kecil petani yang naik turun lereng gunung atau bukit di wilayah Katahan Buru ketika mereka kemalaman dalam perjalanan dan perlu menginap di pesanggrahan tersebut.

## **2.4 Pandangan Filosofis yang Melandasi Kebijakan Raja dalam Mendistribusikan Harta Warisan**

Pada bagian ini dibicarakan pandangan filosofis yang melandasi mengapa raja mendistribusikan bagian-bagian harta warisan

seperti telah disebutkan di depan. Pandangan filosofis yang dimaksud di sini sama sekali bukan pandangan filosofis yang dianut oleh aliran filsafat tertentu. Akan tetapi, pandangan filsafat yang bersifat umum saja, bahkan mungkin lebih cocok dikatakan sebagai pandangan menurut *tattwa* agama yang sangat umum dan bersifat dasar.

Munculnya rumusan masalah ini sesungguhnya didasari oleh kenyataan bahwa bangunan suci keagamaan yang dalam pemahaman penulis boleh dikatakan identik dengan dewa sebagai manifestasi Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang dipuja dalam bangunan suci yang bersangkutan dihaturkan harta warisan yang *nota bene* merupakan benda-benda yang kasat mata; sementara itu, Ida Sang Hyang Widhi Wasa adalah sangat abstrak, yang benar-benar bersifat *acintya*, di luar wilayah daya nalar manusia.

Dalam upaya memahami hal itu, penulis mendekatinya dari ajaran *tattwa* agama yang disebut *Pañca śraddhā*. Sebagaimana telah diketahui menurut ajaran *śraddhā* pertama yaitu keyakinan akan adanya Ida Sang Hyang Widhi bahwa alam semesta ini termasuk dunia di dalamnya beserta segala isinya, sudah tentu mencukupi manusia adalah ciptaan Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Putra dkk, 2013 : 103). Lebih lanjut dapat dipahami bahwa tanah, tetumbuhan baik yang berbuah maupun berumbi, dan sebagainya adalah juga untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk yang hidup di dunia. Pendek kata, jika pandangan ditekankan pada sisi manusianya, maka dapat dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sekaligus dengan alam di sekitarnya adalah sebagai tempat hidupnya serta tempatnya mencari segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia akan dapat berkembang baik dalam dimensi kuantitas maupun dalam dimensi kualitasnya sehingga dunia pun akan semakin berkembang.

Lebih lanjut, apabila ajaran tersebut dikaitkan dengan inti ajaran *śraddhā* ketiga, yaitu keyakinan akan adanya hukum *karmaphala* yang pada intinya menyatakan bahwa semua perbuatan, baik perbuatan yang baik (*śubhakarma*) maupun perbuatan yang buruk (*aśubhakarma*) pasti



akan ada hasil atau pahalanya. Lazim orang mengatakan bahwa perbuatan baik hasilnya akan baik, perbuatan buruk hasilnya pasti buruk pula.

Hal lain yang perlu disadari pula adalah bahwa hanya pahala perbuatan yang dilakukan pada masa hidupnya yang sedang dilakoni sajalah atau yang merupakan isi konsep *prarabdha karmaphala*, paling tidak sebagian di antaranya dapat dinikmati oleh pelakunya, baik pahala itu bersifat *tangible* atau *intangible*. Sementara itu, pahala perbuatan manusia yang termasuk isi konsep *sañcitakarmaphala* dan *kriyamanakarmaphala* dapat dinikmati atau diwarisi atau diwariskan oleh seseorang hanya berupa “benih” pahala. Apakah benih itu dapat diwujudkan menjadi sesuatu pahala yang kongkret, sangat tergantung kepada kemampuan orang yang menerimanya.

Apabila hal yang dibicarakan dengan perkataan yang agak banyak itu diringkas kiranya dapat dipahami bahwa seseorang manusia tidak dapat membawa hasil karya atau pahala perbuatannya yang berupa benda kongkret ke alam lain. Di sisi lain, sesuai dengan inti ajaran *śraddhā* pertama bahwa dunia beserta segala isinya aalah ciptaan Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, maka harta benda milik sesuatu keluarga yang ditinggal mati oleh keluarga yang bersangkutan harus dikembalikan kepada “pemilik yang sesungguhnya” yaitu Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Jika manusia yang bersangkutan lahir kembali ke dunia, maka harta itu dapat dimohon kembali untuk digunakan selama hidupnya.

Pandangan filosofis seperti itulah tampaknya yang melandasi kebijakan raja untuk menetapkan harta warisan *krāṅgan ampung* supaya dihaturkan kepada bangunan suci keagamaan tempat memuja dewa tertentu yang dipandang sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Bahwasannya *satra* di pertapaan di Katahan Buru sebagai sebuah kompleks bangunan yang fungsinya tidak terlepas dari upaya-upaya mengagungkan Tuhan, juga mendapat bagian dari harta warisan *krāṅgan ampung* kiranya dapat dipahami pula apabila dilihat dari perspektif pandangan filosofis seperti telah disebutkan.

## 2.5 Aneka Varian Data Prasasti yang Telah Ditemukan

Patut diakui bahwa tidak semua data prasasti yang berkenaan dengan harta warisan *krāṅgan ampung* menunjukkan keadaan yang sama dengan yang terbaca dalam prasasti 001 SUkawana AI (804 Saka) yang telah dibahas di depan. Data atau bagian teks prasasti yang hampir sama dengan data dalam prasasti 001 itu hanya terbaca dalam prasasti nomor 005 Bangli, Pura Kehen A ( - Saka) (Goris, 1954a : 60). Data dalam prasasti-prasasti lainnya sangat bervariasi, bahkan ada di antaranya yang sudah tidak pantas dikatakan sebagai varian lagi, karena sudah sangat berbeda.

Berdasarkan kenyataan seperti itu maka lebih lanjut patut dinyatakan bahwa bahasan yang telah disajikan di depan sesungguhnya sama sekali belum selesai secara tuntas. Masih cukup banyak yang dapat dibicarakan apabila ingin berbicara secara mendetail dan cermat. Akibatnya lebih lanjut judul artikel ini pun dapat dikatakan menjadi kurang tepat karena isi yang sepatutnya dicakupi belum sepenuhnya. Akan tetapi, bahwasanya hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahasan yang telah disajikan memang benar ada datanya dalam prasasti yang berasal dari zaman Kerajaan Bali Kuno yang telah diperiksa. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu penulis tetap mengharapkan agar artikel ini ada manfaatnya, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukan.

## III. PENUTUP

Pada bagian penutup ini, sebagaimana lazimnya penulis ingin memberikan penegasan mengenai beberapa hal yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya. Pertama, rasio pembagian harta warisan keluarga yang tergolong *krāṅgan* (keluarga tanpa keturunan) yang melandasi kebijakan raja atau pucuk pemerintahan pada zaman Bali Kuno adalah 1 : 2, dalam artian bahwa si istri mendapat satu pertiga bagian dan si suami mendapat dua pertiga bagian. Anomalinya, sampai saat ini hanya ditemukan dalam prasasti nomor 636 Jagaraga. Kenyataan yang terbaca dalam prasasti ini adalah sebaliknya.

Kedua, sebagaimana terbaca dalam prasasti nomor 001 Sukawana AI (804 Saka) dan sejumlah prasasti lainnya, ternyata raja atau pucuk pemerintahan mendistribusikan bagian harta warisan *krāṅgan ampung*, pada dasarnya menjadi dua, yaitu bagian yang tergolong harta bergerak, kecuali uang, dihaturkan ke bangunan suci Hyang Api dan bagian harta warisan yang tergolong harta tak bergerak dihaturkan kepada bangunan suci Hyang Tanda. Sementara itu, yang berupa uang (*bilang*) diserahkan kepada *satra* (pesanggrahan) yang merupakan bagian kompleks pertapaan di Katahan Buru.

Ketiga, pandangan filosofis yang melandasi kebijakan raja tersebut pada hakikatnya adalah bahwa Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa menciptakan manusia sekaligus dengan alam di sekitarnya sebagai tempat mencari kebutuhan hidupnya. Namun, harta benda yang berhasil dimiliki oleh manusia boleh dikatakan selaku barang “pinjaman” yang tidak boleh dibawa mati atau ke alam lain. Ketika si peminjam meninggal, barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada “pemilik yang sesungguhnya” yaitu Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan dapat dipinjam kembali ketika manusia yang bersangkutan lahir kembali ke dunia.

Keempat, masih banyak hal yang dapat dan perlu diungkap mengenai harta warisan *krāṅgan ampung* agar tercapai pemahaman yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astra, I Gde Semadi. 1980. “Laporan Sementara Tentang Prasasti Jagaraga”. Denpasar : Lembaga Penelitian, Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_. 1997. “Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII : Sebuah Kajian Epigrafis” (Disertasi belum terbit). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Goris, R. 1948. *Sejarah Bali : Bali Kuna*. Singaraja.
- \_\_\_\_\_. 1954a. *Prasasti Bali I*. Bandung : N.V. Masa Baru.
- \_\_\_\_\_. 1954b. *Prasasti Bali II*. Bandung : N.V. Masa Baru.
- Lanman, Charles Rockwell. 1959. *A Sanskrit Reader*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
- MacDonell, Arthur Anthony. 1974. *A Practical Sanskrit Dictionary*. Oxford University Press.
- Monier-Williams, Sir M. 1986. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi, Patna, Waranasi : Motilal Banarsidass.
- Putra dkk, Ida Bagus Rai. 2013. *Swastikarana : Pedoman Ajaran Hindu Dharma*. Parisada Hindu Dharma Indonesia : PT. Mabhakti.
- Soemadio dkk., Bambang. 1990. “Jaman Kuna”, dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds). *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta : Departemen P dan K. Balai Pustaka.
- Zoetmulder, P.J. 1982a. *Old Javanese-English Dictionary I*. s-Gravenhage : Martinus Nijhoff.
- \_\_\_\_\_. 1982b. *Old Javanese-English Dictionary I*. s-Gravenhage : Martinus Nijhoff.